

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Berbicara tentang umat Islam di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari dua organisasi masyarakat terbesar, yaitu Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama, dimana Muhammadiyah merupakan representative dari Islam modern sedangkan Nadhatul Ulama representative dari Islam tradisional.<sup>1</sup>

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al Qur'an dan Hadist. Sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.<sup>2</sup>

Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang terlahir dari hasil pergejolakan pemikiran pendirinya. Sebagai sebuah organisasi yang pada hakekatnya merupakan Gerakan, Muhammadiyah memiliki tujuan, disamping usaha kerjasama dan sekelompok orang yang disebut anggota Persyarikatan, yang bekerja melaksanakan usaha tersebut untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan adalah nilai tertentu yang ingin dicapai dan diperoleh di masa yang akan datang. Ia merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui berbagai kegiatan organisasi.

-

<sup>2</sup> Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 6 Tahun 2005

Bagi Persyarikatan Muhammadiyah, tujuan adalah merupakan satu faktor yang sangat penting dan sentral. Tujuan merupakan sebuah target atau keinginan yang akan dicapai melalui rangkaian kegiatan dan tindakan di mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengendalian dan evaluasi.<sup>3</sup> Tujuan yang ada akan memberikan arah pergerakan organisasi dan merupakan sarana dimana kepentingan organisasi dapat disalurkan melalui berbagai usaha yang telah disepakati dalam menggapai tujuan tersebut.<sup>4</sup> Ini berarti dalam penentuan strategi, kebijaksanaan dan langkah-langkah organisasi, tujuan adalah merupakan landasan utamanya.

Demikian pula tujuan juga menjadi dasar bagi pembagian dan penggolongan tindakan-tindakan organisasi dalam kesatuan-kesatuan tertentu, disamping juga menjadi dasar bagi penentuan dan perumusan kegiatan dan setiap kesatuan serta penempatan personil dalam kesatuan-kesatuan tersebut. Selanjutnya tujuan juga menjadi landasan utama dalam melakukan pergerakan, sejak dan pemberian motivasi, pemberian bimbingan, penjalinan hubungan dan komunikasi sampai pada peningkatan dan pengembangan personil. Demikian pula dalam proses pengendalian dan evaluasi, terutama dalam penentuan standar dan tolok ukur, yang menjadi pedoman adalah tujuan itu. Pendek kata, tujuan adalah merupakan kompas pedoman yang tidak boleh diabaikan dalam proses penyelenggaraan usaha Muhammadiyah.

Gerakan Muhammadiyah yang berkarakter dakwah dan tajdid tersebut dilakukan melalui sistem organisasi (jam'iyah) dan bersifat ekspansi (penyebaran, perluasan). Kata-kata "waltakum minkum ummatun" dalam Al Qur'an surah Ali Imran 104 yang sering disebut sebagai "ayat" Muhammadiyah", merupakan pemaknaan baru mengenai kepentingan menggerakkan Islam melalui organisasi atau persyarikatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar administrasi dan manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 36

<sup>4</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE-UGM, 2000), hlm. 37

<sup>5</sup> Haedar Nasir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. (Malang : UPTP UMM 2006), hlm. xxiii

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. 03:104)*

Karakter pembaharuan yang dimiliki Muhammadiyah merupakan pembeda Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan Islam lainnya di Indonesia termasuk Persatuan Indonesia yang juga merupakan aliran modern. Deliar Noer mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai gerakan modern yang memiliki sifat toleran, sedangkan Persatuan Islam bersifat keras.<sup>6</sup>

Pada tahun 1972, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengesahkan penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang disusun oleh H.M.Jindar Tamimy. Dalam penjelasan tersebut, antara lain digambarkan bahwa “Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” adalah Suatu masyarakat dimana keutamaan, kesejahteraan dan kebahagiaan luas merata. Masyarakat semacam itu adalah merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam, yang akan menjamin sepenuhnya keadilan, persamaan, keamanan, keselamatan dan kebebasan bagi semua anggotanya. Masyarakat Islam yang sebenar benarnya itu selain merupakan kebahagiaan di dunia bagi seluruh manusia, akan juga menjadi tangga bagi umat Islam memasuki pintu gerbang Surga “jannatun na'im” untuk mendapatkan keridhaan Allah yang abadi.

---

<sup>6</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta : LP3ES, 1996), hlm. 320

Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun.

Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Persentuhan Muhammadiyah dengan politik di Indonesia telah berlangsung lama sejak organisasi ini berdiri. Tahun 1926 melalui kongres Sarikat Islam (SI) memberlakukan disiplin partai bagi anggotanya yang merangkap dengan organisasi Islam lain, dan anggota Muhammadiyah banyak yang menarik diri dari partai Islam itu. Demikian halnya dengan kedudukannya sebagai anggota istimewa di Masyumi. Karena masalah-masalah internal yang ditimbulkan dari keterlibatan Muhammadiyah itu, maka muncul perdebatan sengit dalam Tanwir Muhammadiyah di Kaliurang pada 31 Mei s/d 3 Juni 1955. Dalam perdebatan itu, sebagaimana pada kasus disiplin partai di SI, muncul dua kubu antara yang tetap bertahan atau keluar dari Masyumi. Akhirnya Tanwir Kaliurang itu melahirkan keputusan:

- 1) Muhammadiyah tetap dalam khitahnya sebagai gerakan sosial-keagamaan, tetapi yang berkenaan dengan politik-praktis disalurkan dan diatur bersama dalam Masyumi.
- 2) Anggota-anggota Muhammadiyah yang berkeinginan hendak berjuang di lapangan politik secara langsung, dianjurkan supaya masuk menjadi anggota Masyumi,
- 3) Statemen bersama di antara PP Muhammadiyah dengan Dewan Pimpinan Masyumi (tetapnya Muhammadiyah dalam Masyumi dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah yang timbul) diterima dengan aklamasi.

Pada tahun 1956, agenda politik tetap menjadi perbincangan, dan semangat kembali ke gerakan dakwah yang lebih membangun masyarakat semakin tumbuh. Sejak itulah digodok sebuah konsep yang meneguhkan jatidiri Muhammadiyah, sehingga tahun 1962 dirumuskan kepribadian Muhammadiyah. Konsep inilah antara lain yang ikut menjiwai dan kemudian menjadi mat rantai perumusan khittah Muhammadiyah tahun 1971, yang menjadi acuan pokok bagi Muhammadiyah dalam menghadapi politik.

Khittah 1971 yang berlaku sampai saat ini berisi dua garis langkah Muhammadiyah :

- 1) Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau organisasi Politik apapun,
- 2) Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam menciptakan suasana yang kondusif dan bebas dari segala unsur tarik menarik politik praktis ini baik yang bersifat kepentingan jangka pendek maupun kepentingan jangka panjangnya. Tuntutan akan kemandirian Muhammadiyah dari tarik menarik kepentingan politik ini secara umum dapat diperankan oleh Persyarikatan secara relatif berhasil. Akan tetapi disana sini tentu masih banyak terdapat masalah, baik dalam hal politik maupun pengurusan amal usaha Muhammadiyah. Permasalahan yang ada menjadi koreksi terhadap organisasi agar di masa depan mampu diantisipasi secara lebih matang oleh Muhammadiyah. Dalam kondisi tertentu dirasakan masih terdapat sedikit kendala atau masalah, baik itu keterlibatan individu anggota maupun pengurus Muhammadiyah terhadap organisasi politik maupun rangkap jabatan dalam

amal usaha Muhammadiyah dan organisasi politik yang ada, sebenarnya hal ini menyangkut dinamika yang terjadi di dalam tubuh Muhammadiyah yang senantiasa perlu disikapi secara piawai oleh fungsi kepemimpinan Muhammadiyah.

Hal pertama, kadangkala muncul kesan adanya gejala berubah-ubah penjabaran khittah dan ketentuan AD/ART yang mengatur sikap politik Muhammadiyah dan perangkapan jabatan di organisasi politik.

Hal kedua, berkenaan dengan sikap sementara kader politik Muhammadiyah. Tuntutan Muhammadiyah bagi para kadernya yang berada di arena politik sesungguhnya bersikap luas dan luhur, agar mereka berkiprah secara optimal sebagai kader bangsa yang membawa pesan moral dalam kehidupan politik nasional. Karena itu kader politik Muhammadiyah hadir di arena politik bersifat perseorangan, tidak mengatasnamakan kelembangaan, sehingga mereka dapat bersikap profesional dan mengembangkan kemampuannya secara optimal sebagai politisi dalam memainkan perannya di dunia politik.

Namun kenyataan kadang terjadi, para politisi atau kader politik Muhammadiyah itu, karena lemah identitas dan sikap profesionalnya, sehingga menimbulkan masalah bagi Muhammadiyah secara kelembangaan. Kadangkala masih terdapat sementara kader Muhammadiyah yang masih ingin mengurus atau berambisi untuk memimpin Muhammadiyah, tentunya dengan itikad positif untuk ikut mengembangkan Muhammadiyah dari dalam tetapi tidak mampu memposisikan diri secara dengan jabatan dalam struktur organisasi politik yang diembannya.

Hal yang ketiga, di lingkungan Muhammadiyah sendiri tidak jarang terdapat sementara elit kader yang lebih bertindak sebagai politisi. Para politisi informal ini kadang membawa muatan-muatan kepentingan politik dengan mengatasnamakan kepentingan politik

Muhammadiyah. Jika muncul sementara kader Muhammadiyah yang kritis terhadap kekuasaan, para politisi informal ini dengan sigap menunjuk para kader yang kritis itu sebagai anti pemerintah atau bersikap konfrontatif.

Hal yang keempat, berkenaan dengan sikap sementara warga Muhammadiyah sendiri. Sebagian warga Muhammadiyah masih sering bersikap formalistik. Jika ada kader politik yang berada di orsospol sementara warga Muhammadiyah menginginkan pula agar kader tersebut juga memimpin atau terlibat secara formal dalam kepengurusan Muhammadiyah. Harapannya, Muhammadiyah akan lebih diuntungkan dalam meraih kepentingan politik di negeri ini. Akibatnya organisasi diurus setengah-tengah, sedangkan para kader politikpun menjadi tidak profesional di dunianya. Ini akibat kecenderungan budaya massal dalam sebagian tubuh warga Muhammadiyah, yang mudah silau oleh status formal.

Dari beberapa permasalahan yang ada di tubuh Muhammadiyah, Muhammadiyah masih saja terlibat dalam tarik menarik kepentingan politik yang cukup kuat, di awal reformasi 1998 Muhammadiyah kembali terseret arus politik. Bahkan mereka memberikan dukungan yang luar biasa kepada salah satu mantan ketua PP Muhammadiyah Prof. DR. Amien Rais MA dan partai politik yang didirikannya. Tetapi entah karena alasan apa mereka kembali kecewa dan merasa dipecondangi oleh para politisi di dalam partai baru tersebut. Mereka mengeluh dengan terenyuh karena dikalahkan dikandungnya sendiri. Padahal anak-anak muda Muhammadiyah itu mempunyai klaim bahwa, benar atau salah, Partai Amanat Nasional (PAN) itu bisa berkembang seperti sekarang ini hanyalah mungkin karena jasa Muhammadiyah, utamanya melalui infrastruktur organisasi yang telah menasional.

Bukan hanya permasalahan yang terjadi dalam tataran Muhammadiyah secara nasional, dalam wilayah lokal juga Muhammadiyah tidak mampu melepaskan diri dari kepentingan politik

yang ada. Dalam perjalanan perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Utara khususnya berbicara pasca reformasi, khususnya berbicara tentang hasil sidang pleno pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai kebijakan Muhammadiyah setempat adalah merespon setiap permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing, Muhammadiyah Sumatera Utara tidak terlepas dari tarik ulur kepentingan politik di tataran lokal maupun nasional. Pada pemilu 2004, melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Muhammadiyah Sumatera Utara secara tersirat menginstruksikan kepada seluruh anggota dan simpatisannya untuk memilih salah satu calon dari 48 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bertarung memperebutkan 4 kursi anggota perwakilan dari Sumatera Utara.

Instruksi untuk memilih Haji Abdul Halim Harahap, sebenarnya mendapatkan tantangan yang cukup luas dari anggota dan simpatisan Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari keberatan Aisyah yang merupakan wadah bagi Ibu-ibu Muhammadiyah untuk mendukung calon tersebut. Ini disebabkan karena secara organisatoris Abdul Halim Harahap bukan merupakan anggota ataupun simpatisan Muhammadiyah Sumatera Utara, terlebih lagi sebenarnya adanya salah satu anggota Muhammadiyah yang juga menjadi pengurus Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara yang mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan Perwakilan Daerah (DPD) yakni prof Darmayanti Lubis.

Keberatan yang dilakukan oleh Aisyah ini sebenarnya cukup sangat beralasan, akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara pada saat itu, sebenarnya juga cukup beralasan, dikarenakan Abdul Halim Harahap merupakan Ketua dari Al Jamiatul Al Washliyah, yang mana diharapkan dukungan dari Muhammadiyah Sumatera Utara pada saat pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah mampu memberikan hasil maksimal bagi terpilihnya tokoh Islam yang mewakili Sumatera Utara. Dan bukan hal tersebut

saja, diharapkan dengan dukungan dari Muhammadiyah Sumatera Utara ini kiranya kelak suara dari anggota dan simpatisan Al Jamiatul Al Washliyah mampu memberikan kontribusinya dalam pemilihan calon presiden pada pemilu tahun 2004. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu kader terbaik Muhammadiyah yaitu Prof Amien Rais telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon presiden dalam pemilu presiden tahun 2004. Meskipun harapan yang cukup besar dari Muhammadiyah terhadap Al Jamiatul Al Washliyah dalam memberikan dukungannya dalam pemilihan presiden 2004 tidak berjalan maksimal.

Untuk mencermati permasalahan yang ada itu perlu dikaji tentang peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentang peran ini dapat dilakukan dua strategi dan lapangan perjuangan. *Pertama*, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (*real politics*) politik praktis sebagaimana yang dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. *Kedua*, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan.

Untuk melihat dan mengkaji kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut maka menjadi hal yang cukup menarik untuk dikaji sejauh mana pengaruh kebijakan muhammadiyah sumatera utara terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera utara periode 2013-2018.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi kebijakan muhammadiyah sumatera utara terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera utara periode 2013-2018?

2. Bagaimana pengaruh kebijakan muhammadiyah sumatera utara terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera utara periode 2013-2018?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui kebijakan apa yang dikeluarkan oleh muhammadiyah sumatera utara terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera utara periode 2013-2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan muhammadiyah sumatera utara terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera utara periode 2013-2018.

### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah khasanah kepustakaan politik.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjelaskan sikap politik muhammadiyah sumatera utara dalam pemilihan kepala daerah provinsi sumatera utara periode 2013-2018.
3. Sebagai masukan bagi muhammadiyah dalam meneguhkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan tajdidnya

### **E. Batasan Istilah**

Dari judul diatas, ada beberapa istilah yang perlu di batasi pengertiannya, istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Muhammadiyah : Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan pada tanggal 08 dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta.<sup>7</sup>
- Pengaruh : Daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.<sup>8</sup>
- Kebijakan : Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.<sup>9</sup>
- Pemilihan Kepala Daerah : Rakyat melakukan pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>10</sup>

## **F. Telaah Pustaka**

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, atau catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi. Diantara buku-buku yang menjadi bahan telaah adalah:

*1. Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah.* Karya : Haedar Nasir, Malang, UPTP UMM 2006. Dalam sinopsis buku ini dijelaskan jika Muhammadiyah melakukan peneguhan terhadap ideologi gerakan bagi seluruh warga dan sistem organisasinya, maka bukan berarti sedang

---

<sup>7</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2005), hlm. 98

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Perpustakaan Perguruan Kementerian, 1954), hlm. 53

<sup>9</sup> Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

membangun ketertutupan dan berhadapan dengan pihak lain, lebih-lebih secara konfrontatif. Tetapi, yang sesungguhnya terjadi ialah Muhammadiyah sedang menata dan mengurus rumah tangganya sendiri agar kokoh dan tidak diganggu siapapun yang membuat gerakannya lemah dan centang perenang. Muhammadiyah selalu menjunjung tinggi ukhuwah dan kerjasama dengan pihak manapun, lebih-lebih dengan sesama komponen umat dan bangsa.

2. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Karya : Deliar Noer Jakarta, LP3ES, 1996. salah satu karya Deliar Noer yang sangat bagus terutama bagi kalangan akademisi maupun masyarakat Islam ataupun masyarakat umum yang ingin mengetahui berbagai perkembangan perjalanan organisasi Islam di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah Indonesia merdeka.

Deliar Noer mencoba mengungkap berbagai perkembangan organisasi Islam dengan disertai data – data yang sangat lengkap, selain itu juga disertai berbagai data wawancara dengan para tokoh – tokoh Islam, sehingga buku ini masih layak dijadikan sebuah referensi.

## **G. Metode Penelitian**

1. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. hal mana penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagaimana penyajian data secara kuantitatif.

Dari sisi *metodelogis*, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode

yang ada.<sup>11</sup> Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata – kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (*observable*).

*Setting* penelitian dilakukan di Kota Medan sebagai gambaran sebagian dari penerapan gerakan Islam Politik di Indonesia. Pemilihan *setting* didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain Kota Medan merupakan ibu kota propinsi Sumatera Utara yang memiliki keunikan tersendiri terutama mengenai konstalasi politik yang berubah. Pertimbangan kedua memilih Kota Medan sebagai *setting* penelitian adalah pertimbangan efisiensi waktu dan biaya yang terjangkau oleh peneliti.

2. Adapun sumber data penelitian ini perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan tema penelitian.

- 1) AD/ART dan Pedoman Muhammadiyah
- 2) Ketua Muhammadiyah Sumatera Utara
- 3) Ketua bidang Muhammadiyah Sumatera Utara

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal – hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran online, browsing data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi. Buku-buku penunjang atau dokumen tertulis lainnya seperti:

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 5

- 1) *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Karya : Haedar Nasir Malang: UPTP UMM, 2006.
- 2) *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Karya : AG. Subarsono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- 3) *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*, karya Azyumardi Azra. Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- 4) Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Karya : Deliar Noer. Jakarta: LP3ES, 1996.
- 5) *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Nurcholis Majid. Yayasan wakaf Paramadina, Jakarta, 1992.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

*Interview* atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini peneliti menentukan informan untuk di wawancarai dalam pengumpulan data dipilih berdasarkan pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang mengerti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pengumpulan data.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/ perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.

### I. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik “*Purposive Sampling*” yaitu dipilih berdasarkan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan Informan yang dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.

**Tabel 1. Deskripsi Informan**

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

1.	Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA	Ketua Muhammadiyah Sumatera Utara.
2.	Irwan Syahputra, MA	Sekretaris
3	Dr. Agussani, MAP	Bendahara
4	Ihsan Rambe, SE, M.Si	Wakil Ketua
5	Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum	Wakil Ketua
6	Drs. H. Ibrahim Sakty Batubara, MAP	Wakil Ketua
7	Dr. Muhammad Qorib	Wakil Ketua
8.	Dr. H. Kamal Basri Siregar, M.Ked	Wakil Ketua
9.	Drs. Mutholib, MM	Wakil Sekretaris
10.	Shohibul Anshor Siregar	Warga Muhammadiyah

(Sumber : Wawancara Februari 2017)

Pemilihan informan tersebut berdasarkan kekuatan, posisi dan mempunyai peran yang penting dalam mengetahui bagaimana kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018.

## **J. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang kemudian hasilnya digambarkan secara deskriptif, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi: *Pertama*, proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. *Kedua*, peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang

didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. *Ketiga*, Penarikan kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut.

## **K. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, dan mengenai Metode Penelitian yang penulis gunakan serta sistematika penulisannya.

### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Bab ini berisikan landasan teori-teori kebijakan politik serta teori pembandingan lainnya.

### **BAB III : DESKRIPSI ORGANISASI MUHAMMADIYAH**

Pada bab ini akan dijabarkan tentang profil Muhammadiyah, struktur kepengurusan Muhammadiyah Sumatera Utara dan amal usaha Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang data yang diperoleh dari penelitian dan analisa data mengenai Kebijakan Politik Muhammadiyah Sumatera Utara untuk Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara Periode 2013-2018.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan analisis dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.